

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Persebaran wabah virus Covid-19 di Indonesia semakin parah menimbulkan kecemasan kolektif jika terus menerus menyebar di Indonesia. Maka dari itu, untuk mengatasi penyebaran dari virus covid-19 ini agar tidak terus meningkat, pemerintah memberlakukan suatu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini dibuat dalam tujuan membatasi secara besar-besaran aktivitas masyarakat selama pandemi covid-19 supaya dapat memutus dan menekan rantai penyebaran virus covid-19.

Kebijakan PPKM ini juga dinilai pemerintah sebagai jalan tengah dari desakan masyarakat yang meminta Indonesia melakukan *lockdown* (Kompas.com, 2020). Pemerintah tidak menggunakan istilah *lockdown* dalam kebijakannya sebab penggunaan istilah PPKM berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, definisi dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yaitu pembatasan kegiatan tertentu masyarakat dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus (Andriyani, 2021).

Perkembangan kasus baru dan meningkatnya kasus kematian akibat virus covid-19 ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam mencermati pelaksanaan kebijakan PPKM. Hingga saat ini, sejumlah wilayah di Indonesia telah menerapkan kebijakan PPKM ini. Ibu Kota Indonesia yaitu Jakarta merupakan daerah pertama yang memberlakukan kebijakan PPKM ini, namun setiap harinya masih menghadapi pertumbuhan kasus baru dan cenderung meningkat tajam.

Kebijakan pemerintah pusat dalam penerapan PPKM tentunya memberikan dampak yang besar pada berbagai aspek kehidupan. Kurangnya koordinasi antara stakeholder, terutama pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketidakharmonisan koordinasi ini menyebabkan pengendalian virus menjadi terkatung-katung (Agustinus, 2020). Dampak yang paling menonjol yaitu terlihat pada aspek perekonomian. Pembatasan untuk melakukan aktivitas dengan skala yang besar secara otomatis dapat menimbulkan kondisi perekonomian yang semakin sulit dengan berhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi tentu sangat berpengaruh dengan daya beli masyarakat itu sendiri. Secara otomatis masyarakat akan memprioritaskan makanan dan kebutuhan pokok utama, sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier akan ditunda atau dikesampingkan dahulu, oleh sebab itu aktivitas menabung akan menurun tajam. Demikian pula pembiayaan dan jasa keuangan, semua akan menunggu dan berharap pandemi ini dapat segera berakhir.

Permasalahan dari dampak pemberlakuan PPKM ini juga terjadi di Kota Surabaya. Berkaitan dengan langkah Pemerintah Kota Surabaya dalam penanganan wabah virus covid-19 di Kota Surabaya, Pemkot Surabaya juga memberlakukan PPKM di Kota Surabaya. Dampak dari PPKM ini pun dialami hampir seluruh

UMKM di Kota Surabaya yang terkena dampak negatif karena pandemi virus covid-19.

Warung kopi (Warkop) termasuk dalam jenis UMKM di Kota Surabaya yang berperan besar dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Warkop merupakan salah satu bidang usaha yang cukup menjanjikan dalam menjalankan UMKM. Jumlah warkop yang berada di Kota Surabaya juga cukup dikatakan terus berkembang dan tumbuh seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Surabaya. Usaha warkop di Kota Surabaya sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat hal ini disebabkan warkop menjadi salah satu tempat yang digunakan oleh masyarakat khususnya usia produktif untuk bersantai atau menongkrong bersama, berkumpul, dan untuk mengerjakan tugas sampai berjam-jam. Adapun jumlah dan perkembangan usaha warkop di empat tahun terakhir yang terdaftar pada data paguyupan warkop Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah perkembangan warkop Surabaya dari tahun 2018-2021

Tahun	Jumlah Perkembangan Warkop
2018	383
2019	391
2020	713
2021	790

Sumber: Sekretariat Paguyupan Warung Kopi di Surabaya, 2022.

Sejak awal mula kemunculan virus covid-19 di Kota Surabaya, usaha warkop ini juga ikut terdampak. Mulai perlahan dari waktu ke waktu warkop mengalami

penurunan pengunjung sehingga berimbas pada penurunan omset di setiap waktunya.

Penurunan pada warkop ini berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan PPKM yang diberlakukan di Kota Surabaya. Dari kebijakan ini, maka larangan untuk menimbulkan kerumunan ini yang membuat warkop mengalami sepi pengunjung. Maka dari itu, dengan adanya keadaan pandemi covid-19 dan pemberlakuan kebijakan PPKM oleh Pemkot Surabaya ini yang membuat penulis berniat untuk dapat melakukan penelitian dengan terfokus pada beberapa pemilik usaha Warung Kopi Kota Surabaya. Maka penulisan karya tulis ini berjudul “**Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surabaya (Studi pada UMKM Warung Kopi di Surabaya)**”.

I.2 Rumusan Masalah

Adapun pembahasan pada penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan kebijakan PPKM pada UMKM warung kopi di Kota Surabaya?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan PPKM pada UMKM warung kopi di Kota Surabaya?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisa dan mendeskripsikan implementasi kebijakan PPKM pada UMKM warung kopi di Kota Surabaya.
2. Menganalisa dan mengidentifikasi faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan PPKM pada UMKM warung kopi di Kota Surabaya.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam penyelesaian karya tulis ini penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan banyak manfaat diantaranya:

I.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses dalam pembelajaran untuk peneliti dalam melaksanakan perkembangan teori-teori kebijakan publik khususnya dalam bidang Ilmu Politik.
- b. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memperdalam sumber referensi, serta menambah ilmu pengetahuan dan pemikiran bagi mahasiswa khususnya dalam bidang Ilmu Politik.

I.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan informasi dan pembelajaran, serta memberikan inspirasi untuk pembaca khususnya pelaku usaha untuk mencoba mengimplementasikan kebijakan yang telah diatur pemerintah terhadap bisnis yang dijalani.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginspirasi para peneliti untuk dapat mengkaji implementasi teori kebijakan publik sebagai penelitian terkait politik strategis.

I.5 Kerangka Konseptual

I.5.1 Konsep Kebijakan

Pada kerangka konseptual ini terlebih dahulu kita akan menguraikan terkait apa yang sebenarnya disebut dengan konsep kebijakan publik. Kebijakan publik dapat diartikan sebagai produk hukum yang merupakan hasil dari keputusan untuk melaksanakan produk hukum tersebut atau tidak dilaksanakan. Kebijakan publik merupakan produk hukum yang melibatkan pemerintah sebagai aktor utama dalam aktivitasnya guna menyelesaikan suatu masalah melalui penerapan peraturan untuk menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Kebijakan publik adalah produk aturan dan kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah di tingkat eksekutif ataupun legislative. Proses perancangan kebijakan pun memerlukan keterlibatan masyarakat untuk mengambil peran dalam proses perancangan kebijakan. Kebijakan publik tercipta melalui serangkaian proses yang sifatnya administrative, politis, dan ilmiah. Tujuan dari kebijakan publik ialah mengelola, mengatur, atau menciptakan jalan guna menyelesaikan masalah yang melibatkan kepentingan publik.

Pembuat kebijakan memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada tiap – tiap negara akan selalu memiliki kelompok – kelompok yang memiliki pokok pikiran yang beragam mengenai sasaran dan arah dari suatu tujuan kebijakan, sehingga ide utama dari kebijakan adalah kegiatan aktor – aktor dan keterlibatannya dalam proses perancangan kebijakan menjadi suatu karakteristik

sendiri dari kebijakan publik. Beberapa kasus banyak aktor – aktor politik yang ketika turun dalam proses perancangan kebijakan memakai sumber daya dan kekuasaannya guna memberi titik tekan pengaruh yang disebar dalam proses merancang kebijakan. Melalui fenomena seperti itu maka muncullah ide mengenai good governance yang mewadahi keputusan dan kebijakan secara transparan, adil, dan tentu saja demokratis.

Pada diskursus ilmu politik, istilah government dan governance kerap dipandang dan dipakai dalam konteks yang sama. Namun sesungguhnya kedua istilah tersebut menyimpan perbedaan yang substansial. Government memiliki makna yaitu “pemerintah”. Pemerintah sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah yang terdapat dalam suatu negara. Governance sendiri berarti “pemerintahan”. Pemerintah merupakan aktor dan aparat yang memiliki tugas untuk menggelar dan menyelenggarakan kewenangan negara, sedangkan pemerintahan sendiri berkaitan dengan tugas, kewenangan, dan aktivitas.

Pemerintah sendiri memiliki tendensi untuk bertindak sebagai penguasa alih – alih sebagai pelayan rakyat. Relasi antara pemerintah dengan tata pemerntahan sendiri dapat dijelaskan melalui konsep relasi dari padi dengan rumput. Padi tidak akan tumbuh jika hanya rumput yang ditanam, namun jika padi yang ditanam maka rumput akan mengikuti tumbuh. Pemerintah yang baik sangat sulit untuk terbentuk jika tidak dibarengi dengan tata pmeerintahan yang baik. Jika menciptakan tata pmerintahan yang baik maka secara otomatis pemerintah yang baik akan terbentuk pula.

Terdapat tiga pilar utama yang menyokong kapasitas dari suatu negara untuk melaksanakan good governance, yaitu; (1) negara/pemerintah (state), (2) sektor privat, dan (3) masyarakat sipil/civil society (Masyarakat Madani). Pemerintah memiliki fungsi dan peran dalam membentuk suasana politik dan hukum yang dapat dikategorikan kondusif dan stabil, kemudian wilayah privat berperan dalam menumbuhkan iklim kompetitif, professional, dan transparan dalam memunculkan lapangan pekerjaan dan dunia usaha. Sedangkan masyarakat sipil memiliki peran dalam menyalurkan koneksi sosial politik dan interaksi yang terjadi di dalamnya untuk bersama – sama secara kolektif dan berkesadaran turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.

1.5.2 Definisi UMKM

Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 pengertian Usaha Kecil Menengah adalah “suatu kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat”.

Terdapat beberapa definisi Usaha Mikro Kecil Menengah baik di Indonesia maupun pada tingkat Internasional yang memiliki pandangan berbeda tentang usaha mikro kecil menengah. di Indonesia terdapat beberapa definisi mengenai Usaha Mikro Kecil Menengah definisi tersebut terdapat didalam Undang-Undang maupun menurut Badan Pusat Statistika. Definisi UMKM menurut undang-undang dapat digolongkan menjadi usaha kecil menengah melalui kuantitas tenaga kerja. Usaha mikro, merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan. Sedangkan usaha kecil, merupakan usaha ekonomi

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang perusahaan yang dimiliki. Sedangkan usaha menengah ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau badan usaha yang bukan milik atau anak perusahaan yang dimiliki atau dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Sedangkan menurut badan pusat statistika(BPS) mendefinisikan UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5-19 orang sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja 20-99 orang.

I.5.3 Implementasi Kebijakan

Pembuat kebijakan memiliki kewenangan penuh dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Pada tiap – tiap negara akan selalu memiliki kelompok – kelompok yang memiliki pokok pikiran yang beragam mengenai sasaran dan arah dari suatu tujuan kebijakan, sehingga ide utama dari kebijakan adalah kegiatan aktor – aktor dan keterlibatannya dalam proses perancangan kebijakan menjadi suatu karakteristik sendiri dari kebijakan publik. Beberapa kasus banyak aktor – aktor politik yang ketika turun dalam proses perancangan kebijakan memakai sumber daya dan kekuasaannya guna memberi titik tekan pengaruh yang disebar dalam proses merancang kebijakan. Melalui fenomena seperti itu maka muncullah ide mengenai good governance yang mewadahi keputusan dan kebijakan secara transparan, adil, dan tentu saja demokratis.

I.5.4 Definisi Warung Kopi

Secara umum warung kopi merupakan tempat yang menyediakan dan menjual minuman olahan dari biji kopi untuk dinikmati oleh masyarakat. Warung kopi merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat berjualan makanan dan minuman. Warung kopi terbentuk untuk memfasilitasi kebutuhan produsen dalam melangsungkan hidup dengan cara menjual minuman atau produk lain berupa kopi. Selain di dukung dan dibentuk oleh faktor lainnya seperti budaya masyarakat yang menyukai kopi dan menjadikan warung kopi sebagai salah satu tempat untuk berinteraksi dengan sesama masyarakat.

Warung kopi adalah tempat yang menyediakan kopi beserta produk turunannya sebagai minuman utama dan berbagai jenis minuman lainnya seperti teh dan cokelat, selain itu juga menyediakan makanan ringan yang juga ditawarkan sebagai camilan pendamping kopi. Warung kopi juga merupakan tempat untuk berkumpul orang-orang yang ingin sekedar bersantai atau melakukan aktivitas ringan lainnya seperti diskusi atau obrolan (Nurazizi, 2013).

Saat ini, pengunjung yang datang ke warung kopi tidak lagi didominasi oleh kalangan dewasa atau orang tua saja, melainkan seluruh bagian masyarakat dari segala usia kini juga menikmati dari keberadaan warung kopi ini.

I.6 Kerangka Teori

I.6.1 Teori Implementasi Kebijakan

Konsep dari implementasi kebijakan dari perumusan Van Meter dan Van Horn dikenal dengan *A Model of the Policy Implementation* (Suharno, 2013). Menurut Suharno konsep implementasinya adalah suatu ide untuk melihat dan menilai eksekusi aturan dari performa atau kualitas dari suatu pelaksanaan paham kebijakan yang telah disusun dengan kriteria dan variabel tertentu yang dapat diukur dan dievaluasi. Menurut Van Horn dan Van Meter proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pelaksanaan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel (Suharno, 2013). Van Horn dan Van Meter menjelaskan bahwa kinerja implementasi memiliki tingkat keberhasilan dan dapat diukur dengan tujuan kebijakan yang memiliki konteks sosio – kultur (Suharno, 2013). Merujuk pada pandangan Van Meter dan Van Horn (Suharno, 2013) sendiri terkait implementasi kebijakan maka terdapat unsur – unsur dari implementasi kebijakan yang diuraikan sebagai berikut:

1) Standard dan tujuan (standards and objectives)

Implementasi kebijakan dapat diukur persentasenya melalui seperangkat alat ukur dengan menentukan tujuan dan sasaran kebijakan yang terukur dan relevan terhadap suasana sosio kultural yang ada dalam masyarakat. Kebijakan dapat sulit terlaksana jika ukuran dan sasaran yang ditetapkan tidak berpijak pada realitas di masyarakat.

Mereka mengungkapkan jika kebutuhan dalam menilai kinerja dari implementasi kebijakan harus dilakukan dalam koridor standar dan target dari sasaran yang menjadi barang wajib bagi pelaksana kebijakan guna memenuhinya. Kinerja kebijakan adalah penilaian dari keseluruhan proses pemenuhan sasaran dan target dari kebijakan. Pengertian tentang standar dan sasaran dalam merumuskan tujuan kebijakan sendiri sifatnya waji karena secara umum implementasi kebijakan akan menemui jalan buntu jika pelaksana kebijakan tidak menguasai pemahaman tentang standar dan sasaran tujuan kebijakan. Standar dan sasaran tujuan kebijakna sendiri memiliki relasi yang erat dengan sikap dari pelaksana kebijakan. Kecenderungan sikap (disposisi) yang dimiliki dan ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan adalah suatu hal yang krusial. Pelaksana kebijakan memiliki kans tinggi mengalami kegagalan karena kurang memahami apa tujuan dari suatu kebijakan.

2) Sumber daya (Resources)

Pada implementasi kebijakan, sumber daya diperlukan dalam prosesnya. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan memerlukan manusia yang memiliki kualitas dan kapabilitas dari profil pekerjaan yang diberikan. Sumber daya manusia adalah sumber daya yang penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Kebijakan yang berhasil dapat terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, khususnya sumber daya manusia.

Selain dari itu, sumber daya finansial atau keuangan juga menjadi sumber dyaa yang penting dalam penerapan implementasi kebijakan. Sumber daya keuangan dapat menyediakan kemudahan proses karena melalui sumber dyaa keuangan akan ada kemudahan untuk mengakses sumber daya yang lain misal sumber daya

infrastruktur. Kekurangan sumber daya pendanaan maka akan sangat memengaruhi tingkat kesuksesan implementasi kebijakan.

3) Karakteristik organisasi pelaksana (characteristics of the implementing agencies)

Implementasi kebijakan melibatkan aktor pelaksana kebijakan yakni suatu organisasi formal dan organisasi informal, maka yang menjadi penting dan krusial adalah karakteristik dari organisasi dan agen pelaksana kebijakan. Implementasi kebijakan menuntut pelaksana kebijakan yang disiplin dan ketat. Sedangkan dalam beberapa situasi implementasi kebijakan perlu adanya agen atau organisasi pelaksana dengan karakteristik yang demokratis dan persuasive.

4) Komunikasi antar organisasi dan aktifitas penguatan (interorganizational communication and enforcement activities)

Seperti yang telah dibahas di atas untuk menaikkan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan maka standar dan tujuan dari suatu kebijakan perlu dimengerti oleh para pelaksana kebijakan. Oleh sebab itu standar dan tujuan dari implementasi kebijakan perlu untuk terkomunikasikan dengan baik kepada para pelaksana kebijakan.

Komunikasi yang terbangun dalam koridor penyaluran informasi kepada agen – agen pelaksana kebijakan mengenai standar dan tujuan memerlukan unsur keseragaman dan konsistensi dari sumber informasi yang valid. Jika terdapat perbedaan dan inkonsistensi dalam pesan – pesan yang terkomunikasikan kepada pelaksana kebijakan maka akan sulit memenuhi standar dan tujuan kebijakan.

Pelaksana kebijakana perlu mendapatkan pesan yang jelas untuk mengetahui apa yang diekspektasikan dari agen dan apa yang perlu dilakukan oleh agen. Komunikasi adalah kunci keberhasilan dari suatu organisasi untuk menjalankan roda organisasi. Khususnya menjalankan program tertentu, seringkali dalam proses pertukaran pesan dalam struktur dan jaringan komunikasi akan mengalami hambatan – hambatan yang mengakibatkan distorsi dalam penerimaan pesan. Sehingga interpretasi atau penafsiran makna dan maksud dari pesan antara pemberi pesan dan penerima pesan akan tidak konsisten. Semakin terukur dan terorganisir pesan dan komunikasi dalam pihak atau agen yang berpartisipasi maka akan semakin naik pula tingkat keberhasilan implementasi kebijakan.

5) Sikap para pelaksana (disposition of implementors).

Kebijakan publik secara umum memiliki sifat dari atas ke bawah yang berarti jarak antara pengambil keputusan dengan kebutuhan dan keinginan dari masyarakat biasanya cukup besar. Sehingga sikap dari agen pelaksana kebijakan entah itu menerima atau menolak ide dan pelaksanaan kebijakan kemungkinan besar mempengaruhi tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan publik.

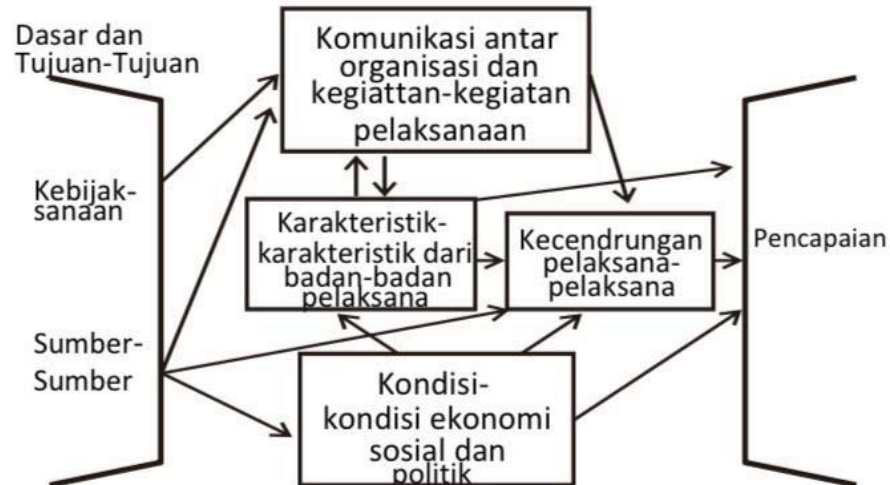
Proses bergulirnya suatu kebijakan publik diawali oleh proses filterisasi masalah melalui persepsi pelaksana kebijakan publik untuk menilai wilayah pelaksanaan kebijakan. Terdapat tiga jenis respon yang memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan publik, yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman dan pendalaman dari konsep kebijakan. Lalu yang kedua adalah kecenderungan reaksi dari subjek dan objek implementasi kebijakan, reaksi dari mereka dapat digolongkan sebagai penerimaan, netral, atau penolakan. Terakhir yang ketiga ialah

instansi atau kebijakan. Pada akhirnya, intensitas kecenderungan dari pelaksanaan kebijakan publik dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja kebijakan.

6) Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (economic, sosial and political conditions)

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Van Meter dan Van Horn menggambarkan model implementasi kebijakan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

I.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur dalam mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Dalam hal ini metode penelitian ialah suatu pengkajian tentang peraturan-perturan tertentu dalam penelitian.

I.7.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu guna mengidentifikasi bagaimana hasil implementasi kebijakan peraturan Pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Surabaya 2021. Selain itu juga berfokus pada faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Pemerintah Kota Surabaya pada saat menghadapi peraturan pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya dalam rangka membantu menurunkan angka penyebaran Covid-19 di Surabaya.

I.7.2 Tipe Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak memakai perhitungan atau istilahnya adalah penelitian ilmiah yang memberi penekanan pada ciri ilmiah sumber data. Penelitian memakai penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini adalah Studi Lapangan, karena penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari wawancara kepada pelaku usaha Warung Kopi di Surabaya dan Kebijakan dari Pemerintah Kota Surabaya. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan

mengenai apa saja dampak yang dialami, hasil implementasi kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

I.7.3 Lokasi dan Subjek Penelitian

Pada metode penelitian yang dilakukan dengan cara kualitatif ini, lokasi dan subjek merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Lokasi penelitian dalam penelitian ini langsung melekat pada fokus penelitian yang telah ditetapkan. Mengubah lokasi penelitian sama dengan mengubah fokus penelitian itu sendiri. Dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Surabaya (Studi Kasus Di UMKM Warung Kopi Surabaya).

Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian sebab Kota Surabaya merupakan salah satu daerah yang sangat terdampak dari pemberlakuan kebijakan PPKM oleh pemerintah terutama pada sektor ekonomi, mengingat Kota Surabaya merupakan kota padat penduduk yang konsumtif sehingga banyak sekali warung kopi di kota ini.

Dalam penelitian ini, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan. Dari informan, peneliti akan mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan cara *purposive* atau disengaja atas dasar kriteria tertentu, diantaranya: memiliki usaha warung kopi

dan terdampak atas kebijakan PPKM. Adapun informan dari subjek penelitian ini adalah:

1. Husin Ghozali sebagai Ketua Paguyuban Warung Kopi di Kota Surabaya.
2. Miftachul Ulum sebagai Sekretariat Paguyuban Warung Kopi di Kota Surabaya.
3. Edi Wiono sebagai Sub Koordinator Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya di Jalan Tunjungan No.1-3 Gedung Siola Lt.3 Kota Surabaya.
4. Mudita D. Widaksa sebagai Koordinator Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 4 Ketabang, Kec. Genteng. Kota Surabaya.
5. Ridwan Mubarun sebagai Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jalan. Jemursari Tim. II No.2 Kota Surabaya.
6. Al pemilik warung kopi Andik di Jl. Kali Raya Rungkut No.78.
7. Alfin Pemilik warung kopi Bening di Jl. Kali Raya Rungkut No.09.
8. Maulana pemilik warung kopi Hilal di, Jl. Raya Panjangjiwo No.3.
9. No pemilik warung kopi Banyu Mili di Jl. Jagir Wonokromo.
10. Maria pemilik warung kopi Maria di Jl. Raya Putat Gede No.52.
11. Aluwi pmeilik warung kopi Aluwi 55 di Jl Kranggan no.75.
12. Nanang pmeilik warung kopi Songo di Jl. Kombes Pol M.Duryat no. 09.

13. Egi Pemilik warung kopi Sahabat Coffee di Jl. Tidar 93 A.
14. Ali pemilik warung kopi Cak Ali di Jl. Kalibutih no.92.
15. Mat pemilik warung kopi seller Surabaya di Jl. Golf 1 Surabaya.

I.7.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, dalam upaya mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan tiga cara yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertama, teknik wawancara yaitu pengumpulan data yang didapatkan langsung dari keterangan informan yang telah ditunjuk. Hal ini bertujuan agar mendapatkan data dengan tingkat validasi dan reabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian dengan metode wawancara ini dilakukan pada subjek penelitian yang telah ditentukan.

Kedua, observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung menggunakan panca indra. Observasi terdiri dari pemerhatian tentang kegiatan, perilaku, tindakan serta kemungkinan interaksi interpersonal, serta proses penataan yang merupakan bagian dari pengalaman manusia yang dapat diamati. Observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian berupa tindakan serta perilaku yang dirasakan oleh pemilik usaha warung kopi dengan diberlakukannya kebijakan PPKM.

Ketiga, melalui telaah terhadap dokumen yang tertulis. Data yang diperoleh dari metode ini berupa catatan laporan, kutipan, serta dokumentasi.

Dalam penulisan penelitian ini, analisis data memiliki tujuan untuk mencari dan menata data secara baik dan sistematis dari hasil pengamatan dan

catatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti serta melakukan studi dokumentasi yang akan menguatkan data penulisan. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menyusun secara sistematis semua data yang didapatkan dan dihimpun untuk dideskripsikakn secara utuh tentang implementasi dari kebijakan PPKM pemerintah terhadap warung kopi di Kota Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan dalma penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Reduksi data, yaitu kegiatan yang dilakuakn dengan jalan abstraksi. Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman pada inti penelitian, proses, dan pernyataan-pernyataan yang penting sehingga harus disebutkan dalma pembahasannya.
2. Paparan data, yaitu penyusunan data dalam suatu kesatuan yang bisa menjawab rumusan masalah.
3. Penyimpulan data, yaitu kegiatan menyimpulkan makna yang muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya.